



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HJ. NURSYAMSIAH
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 101985

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.095.000.000

1. Tanah Seluas 800 m2 di KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/84 m2 di KEPULAUAN MERANTI, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/135 m2 di KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
4. Tanah Seluas 1480 m2 di KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 139.500.000

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SPD MOTOR SALO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 50.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 6.417.199

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.290.917.199

III. HUTANG

Rp. 338.806.800

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 952.110.399

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **18 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.